

DAFTAR PUSTAKA

BUKU.

- Abdul Razak. 2021. *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Litera
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al Haryono Jusup. 2001. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.
- A.P.Perlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- A. Sakti Ramdhon Syah R. 2020. *Perundang-Undangan Indonesia "Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya"*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Askari Razak. 2013. *Hukum Pelayanan Publik*. Makassar: Arus Timur.
- Budi Harsono. 2000. *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Dardiji Darmodihadjo. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi Perangin. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ghansham Anand. 2017. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Imamulhadi dan Ratu D.Nafisah. 2015. *Hukum Dan Keadilan: Ajaran Ahli Hukum Terkemuka*. Yogyakarta: K-media,

- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Jarot Widya Muliawan. 2015. *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Buku Litera.
- Rudi Indrajaya et.all. 2020. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Salim H.S Dan Erlines Septiana Nurbani. 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Kedua*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Salim H.S. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- _____.2019. *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Depok: PT. Rajagrafindo.
- Samsaimun. 2021. *Peraturan Jabatan PPAT (Pengantar Pengaturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sri Hajati, et.all.2018. *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Urip Santoso. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta Teknik Pembuatan Akta*. Jakarta: Prenamedia Group.
- _____. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Surabaya: Prenadamedia Grup.
- Widodo Ekatjahjana. 2008. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Citra Aditia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

JURNAL

Afione Ade Rosika, Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak, "*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*", Volume 12 Nomor 1, Mei 2019.

Abid Zamzami, Keadilan Di Jalan Raya, "*Jurnal Yurispruden*" Volume 1, Nomor 2, Januari 2018.

Ellya Rosana, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, "*Jurnal TAPIS*", Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni, 2013,

Frisca, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sama atau Beda?, *Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman*, Universitas Katolik Parahyangan, November 2021.

M. Jeffri Arlinandes Chandra, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia, "*Jurnal Legislasi Indonesia*", Volume 19 Nomor 1, Maret, 2022.

Michael Frans Berry, Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan, "*Jurnal Muhammadiyah Law Review*", Volume 2 Nomor 2, Juli, 2018

Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah, " *Jurnal Law and Justice*", Volume 2 Nomor 1, April 2017.

Riza Awaludin Rahmansyah, dkk, Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles," *Jurnal Filsafat Terapan*" Volume 1 Nomor 1, Desember 2022.

Sofyan Apendi, Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional, " *Jurnal Unpak PALAR (Pakuan Law Review)*," Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni, 2021.

Purwaning Rahayu Sisworini, Penerapan Honorarium PPAT Sebagai Upaya untuk Penyetaraan Pelayanan (Studi Kasus di Kota Malang), *IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Volume 8 Nomor 3. Desember 2020.

Yosef Keladu, Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles, " *Jurnal DISKURSUS*" Volume 19 Nomor 1, April 2023.

KARYA TULIS ILMIAH

Ayu Amelia. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Fitria Ningsih Bagindo. 2018. *Penerapan Ketentuan Sanksi Pidana Pada Peraturan Desa*. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Marhaendra Wija Atmaja. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Sukamto Satoto. 2004. *Pengaturan Eksistensi Dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

WEBSITE:

Innews.co.id, Aduh, Honor PPAT akan diturunkan? Ini Penjelasan Sekum PP IPPAT. Narasumber: Faruk Alwy selaku Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) IPPAT Maluku Utara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <http://kbbi.web.id/>

Moh. Mahfud MD., *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009